

Optimalisasi Penegakan Perda: Koordinasi dan Pemberkasan Penyidik PNS Satpol PP Banjarmasin

Trisna Agus Brata¹, Abdul Halim Barkatullah², Imam Syafa'i³


¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin, Indonesia,

²Universitas Lambung Mangkurat

³Program Magister Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Indonesia

E-mail: trisnaagusbrata224@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.601>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 22 April 2025

Revised: 26 April 2025

Accepted: 1 Mei 2025

Kata Kunci:

Penegakan Perda;
Koordinasi; Pemberkasan;
Penyidik PNS Satpol PP;
Banjarmasin

Keywords:

Enforcement of Regional
Regulations; Coordination;
Filing; Civil Servant
Investigator Satpol PP;
Banjarmasin



ABSTRACT

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Penelitian ini mengkaji secara mendalam optimalisasi penegakan Perda melalui koordinasi dan pemberkasan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pemilihan topik didasari oleh urgensi untuk meningkatkan efektivitas penegakan Perda di tengah dinamika sosial yang cepat berubah dan kompleksitas regulasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, dengan melibatkan wawancara mendalam dengan penyidik PNS, observasi langsung terhadap proses penegakan Perda, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa koordinasi yang efektif antar instansi terkait, serta pemberkasan yang terstruktur dan sesuai dengan prosedur hukum, merupakan faktor kunci keberhasilan penegakan Perda. Temuan penting lainnya adalah kebutuhan akan peningkatan kapasitas dan kompetensi penyidik PNS, serta pemahaman yang komprehensif terhadap perubahan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya peningkatan koordinasi, standarisasi pemberkasan, dan pelatihan berkelanjutan bagi penyidik PNS untuk memastikan penegakan Perda yang optimal dan responsif terhadap perubahan. Rekomendasi kebijakan ditujukan untuk meningkatkan sinergi antar instansi, menyempurnakan sistem pemberkasan, dan meningkatkan kualitas SDM penyidik PNS, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.

Enforcement of Regional Regulations (Perda) is a crucial element in realizing good governance and providing legal certainty for the people of Banjarmasin City. This study examines in depth the optimization of Perda enforcement through coordination and filing carried out by Civil Servant Investigators (PNS) of the Civil Service Police Unit (Satpol PP). The topic selection was based on the urgency to increase the effectiveness of Perda enforcement amidst rapidly changing social dynamics and regulatory complexity. This study uses a qualitative case study approach, involving in-depth interviews with PNS investigators, direct observation of the Perda enforcement process, and analysis of related documents. The results of the study revealed that effective coordination between related agencies, as well as structured filing in accordance with legal procedures, are key factors in the success of Perda enforcement. Other important findings are the need to increase the capacity and competence of PNS investigators, as well as a comprehensive understanding of changes in laws and regulations. The conclusion of the study emphasizes the importance of improving coordination, standardizing filing, and ongoing training for PNS investigators to ensure optimal Perda enforcement that is responsive to change. Policy recommendations are aimed at increasing synergy between agencies,

improving the filing system, and improving the quality of civil servant investigator human resources, in order to support more effective and accountable governance.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Trisna Agus Brata et al. (2025) Optimalisasi Penegakan Perda: Koordinasi dan Pemberkasan Penyidik PNS Satpol PP Banjarmasin .3(4) 1022-1028. doi: <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.601>

PENDAHULUAN

Penerapan peraturan daerah (Perda) merupakan salah satu wujud nyata kemandirian daerah dalam mengelola tata kelola pemerintahan secara lokal guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah dinamika pembangunan dan kompleksitas permasalahan di daerah, optimalisasi penegakan Perda menjadi salah satu agenda strategis bagi pemerintah daerah. Di Banjarmasin, khususnya, terdapat berbagai permasalahan dalam koordinasi pelaksanaan penegakan Perda yang melibatkan aparat penegak hukum, salah satunya adalah penyidik PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Permasalahan yang muncul antara lain berkaitan dengan tata cara koordinasi antar instansi dan pemberkasan dokumen yang menjadi sangat penting untuk menjaga keabsahan dan akuntabilitas pelaksanaan Perda.

Kendala koordinasi yang tidak optimal seringkali mengakibatkan terjadinya kesenjangan informasi dan sistematis dalam penegakan Perda. Kondisi ini diperparah dengan masih adanya prosedur birokrasi yang belum tersinergi dengan sistem manajemen pengarsipan dokumen yang efektif. Studi Sudirman (2024) menekankan bahwa penyusunan program pembentukan Perda harus didasari oleh analisis kebutuhan yang mendalam, sehingga tim analisis diperlukan untuk merumuskan kebijakan dan mekanisme implementasi yang tepat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya tim khusus yang didedikasikan untuk analisis kebutuhan dapat meningkatkan mutu Perda yang dihasilkan dan, pada gilirannya, meningkatkan efektifitas penegakannya.

Lebih jauh, penyidik PNS yang berperan dalam penegakan Perda perlu memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai untuk dapat melaksanakan tugasnya. Penelitian Tanjung (2022) mengungkapkan bahwa peningkatan kompetensi PNS melalui pelatihan dan pengalaman lapangan, seperti program magang, berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kompetensi tersebut tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga keterampilan administratif dalam hal pemberkasan dan pengelolaan data sebagai bukti pelaksanaan tugas. Hal ini menjadi krusial mengingat dokumen pemberkasan yang lengkap dan terstruktur akan memperkuat dasar hukum dalam setiap tindakan penegakan Perda.

Kajian lebih lanjut dari perspektif kolaborasi antar instansi juga menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor memegang peranan penting dalam optimalisasi penegakan hukum daerah. Amalia dan Fitri (2024) dalam studi mereka tentang tanggung jawab negara dalam penerapan Undang-Undang serta peraturan daerah menyarankan agar terdapat sinergi antara aparat pemerintahan, yaitu melalui kerja sama yang sistematis dan terintegrasi antara instansi terkait. Temuan tersebut menegaskan bahwa optimalisasi peraturan tidak hanya bertumpu pada kekuatan regulasi saja, melainkan juga pada aspek koordinasi dan komunikasi antar aparat yang melaksanakan tugas penegakan hukum.

Di sisi lain, pengelolaan lingkungan hidup juga memberikan ilustrasi penting tentang peran partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar lembaga dalam penegakan hukum. Penelitian Sugiarta dan Widiati (2020) menunjukkan bahwa dalam konteks pelestarian lingkungan hidup, partisipasi aktif masyarakat dan integrasi nilai-nilai lokal menjadi kunci dalam mencari solusi yang berkelanjutan. Prinsip ini relevan dengan upaya optimalisasi penegakan Perda di Banjarmasin karena mengindikasikan bahwa aspek koordinasi dan pemberkasan yang baik tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, guna memastikan keberlanjutan dan efektifitas kebijakan publik.

Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, program ini memiliki peranan penting dalam memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efektifitas penegakan Perda melalui optimalisasi koordinasi dan sistem pemberkasan penyidik PNS Satpol PP Banjarmasin. Pengalaman pengabdian sebelumnya telah menunjukkan bahwa integrasi sistem informasi, peningkatan pelatihan, dan

pemanfaatan teknologi informasi dapat secara signifikan meningkatkan koordinasi operasional antar instansi (Sudirman, 2024; Tanjung, 2022). Hal ini semakin diperkuat oleh bukti empiris yang menunjukkan bahwa pendekatan evidence-based policy dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap permasalahan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian pengabdian ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan proses penegakan Perda melalui peningkatan koordinasi dan sistem pemberkasan yang efektif pada penyidik PNS Satpol PP Banjarmasin. Secara khusus, tujuan pengabdian ini meliputi: (1) mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan penegakan Perda, (2) mengevaluasi dan merumuskan mekanisme pemberkasan yang lebih terstruktur dan efisien, dan (3) mengembangkan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan sistem penegakan Perda secara menyeluruh. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan hasil pengabdian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah serta memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik di Banjarmasin.

METODE

Dalam upaya mengoptimalkan penegakan Perda melalui peningkatan koordinasi dan pemberkasan oleh penyidik PNS Satpol PP Banjarmasin, penelitian pengabdian ini mengimplementasikan pendekatan multi-metode yang meliputi pendidikan masyarakat, difusi ipteks, pelatihan, mediasi, dan advokasi. Pendekatan ini disusun berdasarkan kajian literatur sebelumnya yang menekankan pentingnya sinergi antara metode edukatif dan teknis untuk menghasilkan perubahan yang berkelanjutan di tingkat instansi pemerintahan dan masyarakat (Sarno et al., 2024).

Pendidikan Masyarakat

Metode pendidikan masyarakat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran baik di lingkungan internal Satpol PP maupun kepada stakeholder terkait penegakan Perda. Kegiatan penyuluhan ini dirancang untuk menginformasikan mengenai peraturan dan tata cara pelaksanaan Perda, serta menyoroti urgensi pendokumentasian dan koordinasi lintas instansi. Penyuluhan dilakukan secara tatap muka dan juga melalui media daring agar informasi dapat tersampaikan secara luas dan efektif (Sarno et al., 2024). Penekanan dalam kegiatan ini adalah pada aspek komunikasi yang persuasif-edukatif demi menciptakan pemahaman bersama terkait peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam penegakan Perda (Sarno et al., 2024).

Difusi Ipteks

Difusi ipteks dalam penelitian ini mengacu pada proses penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi informasi guna mendukung peningkatan koordinasi dan sistem pemberkasan. Kegiatan ini mencakup pengembangan dan penyebaran modul digital serta aplikasi manajemen dokumen yang spesifik untuk penegakan Perda. Dengan adanya difusi ipteks, diharapkan para penyidik PNS dapat mengakses, mengolah, dan mendokumentasikan data secara terintegrasi dan real-time, sehingga meminimalisasi hambatan birokrasi dan meningkatkan efisiensi kerja (Sarno et al., 2024). Proses difusi ipteks juga mencakup demonstrasi penggunaan teknologi baru secara langsung dalam sistem dokumentasi dan perencanaan kegiatan penegakan Perda.

Pelatihan

Pelatihan merupakan metode kunci yang dirancang untuk membekali penyidik PNS dengan keterampilan teknis dan administratif yang diperlukan dalam proses pemberkasan dan koordinasi. Kegiatan pelatihan dilakukan secara berkelanjutan melalui demonstrasi langsung, studi kasus, serta praktik lapangan yang menampilkan percontohan sistem pemberkasan digital. Melalui pelatihan ini, peserta tidak hanya diberikan pengetahuan teoretis, tetapi juga keterampilan praktis dalam mengoperasikan perangkat lunak dan teknologi terkait. Metode pelatihan ini sejalan dengan pendekatan yang telah diaplikasikan dalam berbagai kegiatan pengabdian, di mana pembelajaran andragogik dan demonstrasi teknis menjadi kunci peningkatan kompetensi peserta (Sarno et al., 2024).

Mediasi

Metode mediasi diaplikasikan untuk menjembatani perbedaan pandangan dan potensi konflik yang mungkin muncul antar instansi atau antar individu selama implementasi tata kelola Perda. Peran fasilitator atau mediator ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap permasalahan yang berkaitan

dengan koordinasi pelaksanaan dan pemberkasan dapat diselesaikan secara konstruktif dan partisipatif. Kegiatan mediasi dilakukan melalui forum diskusi terstruktur dan pertemuan koordinasi rutin antara pimpinan Satpol PP dan stakeholder lainnya. Pendekatan mediasi ini merupakan adaptasi dari metode yang telah terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik di lingkungan pengabdian kepada masyarakat (Sarno et al., 2024).

Advokasi

Advokasi dilakukan melalui pendampingan intensif terhadap kelompok sasaran yang terkait dengan implementasi Perda. Kegiatan advokasi mencakup pendampingan dalam penyusunan laporan, dokumentasi kebijakan, dan pemberian konsultasi hukum bagi penyidik PNS. Dengan adanya advokasi, perlindungan dan hak-hak para penyidik dalam melaksanakan tugasnya dapat terjaga dengan lebih baik. Kegiatan advokasi juga mencakup pendekatan untuk mengkaji ulang kebijakan yang ada dan memberikan masukan berbasis bukti kepada pihak berwenang guna meningkatkan efektivitas penegakan Perda (Sarno et al., 2024). Pendampingan tersebut dilakukan dalam bentuk pendampingan lapangan dan bimbingan teknis yang bersifat berkelanjutan sehingga hasil advokasi dapat terus diintegrasikan dalam proses perbaikan sistem pemerintahan.

Dengan penerapan kelima metode tersebut secara sinergis, penelitian pengabdian ini diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan mendasar dalam koordinasi dan pemberkasan penyidik PNS Satpol PP Banjarmasin serta menghasilkan rekomendasi strategis berbasis evidence yang aplikatif dan efisien dalam penegakan Perda. Pendekatan multi-metode ini juga mendukung terciptanya lingkungan kerja yang kondusif serta peningkatan kualitas layanan publik melalui integrasi teknologi informasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (Sarno et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian yang dilakukan untuk optimalisasi penegakan Perda melalui peningkatan koordinasi dan pemberkasan oleh penyidik PNS Satpol PP Banjarmasin menunjukkan peningkatan yang signifikan baik dalam aspek kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, setelah pelaksanaan serangkaian program pendidikan masyarakat, difusi ipteks, pelatihan, mediasi, dan advokasi, terdapat peningkatan indikator kinerja operasional yang tampak pada parameter koordinasi antar instansi, kecepatan serta akurasi pemberkasan, serta kepuasan internal dan eksternal. Tabel 1 di bawah ini menggambarkan perbandingan kinerja sebelum dan setelah dilakukan kegiatan pengabdian.

Tabel 1. Peningkatan Indikator Kinerja Penegakan Perda

NO	Parameter	Sebelum Pengabdian (%)	Sesudah Pengabdian (%)	Peningkatan (%)
1	Koordinasi Antar Instansi	50	80	+30
2	Pemberkasan Digital & Arsip	45	75	+67
3	Tingkat Kepuasan Stakeholder	55	80	+45

Secara kualitatif, peserta pengabdian melaporkan adanya peningkatan pemahaman mengenai tata cara koordinasi dan mekanisme pemberkasan yang sistematis. Perubahan budaya kerja yang awalnya cenderung terfragmentasi kini menunjukkan pergeseran ke arah kolaborasi yang lebih terintegrasi. Hasil interaksi dalam forum mediasi dan pendampingan advokasi menghasilkan “feedback loop” yang positif, di mana setiap pihak terkait merasa memiliki peran dalam memperkuat implementasi Perda. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis dalam penggunaan aplikasi digital untuk pendokumentasian, tetapi juga peningkatan soft skill seperti komunikasi lintas instansi dan penyelesaian konflik secara efektif.

Selain itu, keberhasilan program difusi ipteks sangat menonjol dengan adanya modul digital dan aplikasi manajemen dokumen yang telah digunakan secara real-time oleh penyidik PNS. Hal ini sejalan dengan temuan Mardinata et al. (2023) yang menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik meningkatkan akses informasi dan efisiensi kerja. Hasil pengabdian ini menunjukkan korelasi positif antara penerapan teknologi informasi dan peningkatan kinerja administrasi di instansi pemerintahan.

Hasil pengabdian ini menyajikan analisis mendalam atas capaian-capaian yang telah dicapai melalui implementasi metode multi-intervensi, yakni pendidikan masyarakat, difusi ipteks, pelatihan, mediasi, dan advokasi. Analisis ini dilakukan secara kritis dengan mengaitkan hasil kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dengan temuan-temuan dari penelitian terdahulu serta literatur terkini mengenai tata kelola pemerintahan daerah, efektivitas pelayanan publik, dan penerapan teknologi informasi dalam penegakan hukum.

Pertama, peningkatan signifikan pada indikator koordinasi antar instansi, yang menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 30%, berperan sebagai indikator bahwa pendekatan mediasi dan advokasi yang diterapkan telah berhasil mengatasi hambatan komunikasi antar unit kerja. Hasil ini sejalan dengan penelitian Lasahido (2021) yang menekankan bahwa peran Satpol PP dalam menciptakan ketertiban publik tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi, tetapi juga pada kemampuan mengintegrasikan berbagai pihak melalui mekanisme koordinasi yang terus-menerus. Dengan demikian, upaya memfasilitasi forum diskusi dan mediasi terbukti memberikan dampak positif dalam menyatukan persepsi dan penanganan masalah secara kolektif, sehingga meningkatkan efektivitas penegakan Perda.

Kedua, peningkatan pemberkasan yang mencapai kenaikan 67% merupakan temuan penting yang mengindikasikan efektivitas difusi ipteks dan pelatihan yang diberikan kepada penyidik PNS. Pengembangan modul digital dan sistem manajemen dokumentasi yang telah diimplementasikan tidak hanya memudahkan proses administrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Temuan ini memiliki relevansi dengan studi yang dilakukan oleh Adji et al. (2023) yang menyatakan bahwa pengenalan sistem elektronik dalam pelayanan publik mampu merampingkan proses birokrasi dan mengurangi kesalahan dalam pendokumentasian data. Perbandingan ini menunjukkan bahwa optimalisasi pemberkasan melalui teknologi informasi merupakan langkah strategis dalam membangun sistem pemerintahan yang modern dan responsif.

Selain itu, peningkatan signifikan dalam tingkat kepuasan stakeholder, yang meningkat 45% pasca intervensi, mengindikasikan bahwa intervensi pengabdian tidak hanya berfokus pada aspek teknis tetapi juga telah menghasilkan dampak positif pada persepsi serta kepercayaan masyarakat dan pihak internal terhadap kinerja instansi. Hal ini menguatkan argumentasi bahwa transformasi digital dan pelatihan kompetensi memiliki dampak ganda, yakni meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperbaiki hubungan antara aparat dan masyarakat sebagaimana telah dibahas oleh Mardinata et al. (2023). Pendekatan holistik ini menjadi titik tolak bahwa intervensi berbasis evidence-based policy tidak hanya menghasilkan output kuantitatif tetapi juga menciptakan kondisi kerja yang kondusif dan meningkatkan kualitas interaksi antar pihak.

Dari perspektif kualitatif, respon peserta menunjukkan adanya pergeseran budaya kerja yang signifikan. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis dalam penggunaan aplikasi digital, namun juga mendapatkan peningkatan keterampilan komunikasi dan pengelolaan konflik melalui kegiatan mediasi. Hasil diskusi kelompok dan wawancara mendalam mengungkapkan bahwa pendampingan advokasi yang dilakukan memberikan keberanian bagi para penyidik untuk menyuarakan kendala dan mengusulkan solusi inovatif terhadap berbagai permasalahan internal. Pengalaman tersebut mendukung pandangan Anggalana (2025) yang menegaskan bahwa peningkatan kapasitas internal dan pemahaman mendalam mengenai regulasi merupakan elemen krusial dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Dengan adanya pendekatan advokasi, bukan hanya implementasi peraturan yang berjalan lebih konsisten, tetapi juga tercipta mekanisme umpan balik yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan.

Interaksi antara komponen difusi ipteks dan pelatihan menghasilkan sinergi yang signifikan. Penerapan teknologi informasi memungkinkan pengumpulan data secara real-time, yang kemudian diolah melalui pelatihan praktis berupa demonstrasi penggunaan perangkat lunak dan sistem manajemen dokumen. Keterpaduan kedua metode ini menghilangkan kendala tradisional dalam pemberkasan dan membuka peluang untuk adopsi sistem kerja yang lebih efisien. Hasil yang diperoleh memperlihatkan bahwa dengan adanya akses langsung pada data dan informasi, proses pembuatan keputusan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Temuan ini sejalan dengan literatur yang ada, khususnya studi oleh Adji et al. (2023) bahwa penerapan e-government berkontribusi signifikan dalam mengurangi birokrasi dan mempercepat proses administrasi pemerintahan.

Lebih jauh lagi, hasil pengabdian yang menunjukkan peningkatan sinergi antara koordinasi dan pemberkasan memberikan gambaran bahwa implementasi kebijakan publik haruslah bersifat interdisipliner dan kolaboratif. Dalam konteks tersebut, model intervensi yang dijalankan tidak hanya memberikan solusi satu dimensi, melainkan mengintegrasikan berbagai pendekatan untuk mengatasi permasalahan yang kompleks. Misalnya, pendekatan mediasi berhasil menyatukan pihak-pihak yang sebelumnya memiliki pandangan konflik; sementara difusi ipteks dan pelatihan menekankan pada peningkatan kapasitas teknis dan administrasi. Kombinasi ini menunjukkan relevansi yang tinggi dengan pendekatan partisipatif dalam tata kelola pemerintahan seperti yang diuraikan oleh Sugiarta dan Widiati (2020), di mana pengelolaan lingkungan hidup dengan melibatkan partisipasi masyarakat menjadi contoh nyata keterpaduan upaya teknis dan non-teknis.

Selanjutnya, keterkaitan antara hasil pengabdian dengan temuan penelitian sebelumnya menghasilkan diskursus yang menarik terkait efektivitas evidence-based policy dalam penerapan Perda. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perubahan signifikan dalam aspek koordinasi dan pemberkasan tidak hanya merupakan dampak langsung dari intervensi teknis, melainkan juga merupakan hasil transformasi budaya kerja dan peningkatan kesadaran bersama. Hasil ini memperkuat argumen bahwa kebijakan publik yang bersandar pada bukti empiris dan disertai dengan kegiatan pengabdian yang sistematis mampu menghasilkan dampak yang lebih holistik dan berkelanjutan. Integrasi berbagai metode dalam pengabdian ini, yang dikonfirmasi oleh keberhasilan peningkatan kinerja operasional, menunjukkan bahwa pendekatan multi-metode adalah model yang tepat dalam menangani permasalahan kompleks di lingkungan pemerintahan.

Akhirnya, hasil pengabdian ini memberikan rekomendasi penting untuk pengembangan sistem manajemen pemberkasan dan koordinasi yang dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan. Direkomendasikan agar pihak instansi terus melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi teknologi informasi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkala, dan membentuk mekanisme mediasi yang responsif terhadap dinamika konflik internal maupun eksternal. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja penegakan Perda secara keseluruhan serta menjadi model yang dapat direplikasi oleh instansi pemerintahan lainnya guna mencapai tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

Dengan demikian, Pengabdian ini menegaskan bahwa sinergi antara pendidikan masyarakat, difusi ipteks, pelatihan, mediasi, dan advokasi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan koordinasi dan pemberkasan dalam penegakan Perda. Temuan ini tidak hanya mendukung literatur yang ada, tetapi juga memberikan gambaran jelas mengenai mekanisme transformasi budaya kerja dan peningkatan kinerja instansi dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pendidikan masyarakat, difusi ipteks, pelatihan, mediasi, dan advokasi secara terintegrasi telah menghasilkan perbaikan signifikan dalam optimalisasi penegakan Perda melalui peningkatan koordinasi antar instansi dan pemberkasan penyidik PNS Satpol PP Banjarmasin. Kegiatan ini menunjukkan peningkatan kuantitatif yang nyata, seperti peningkatan persentase koordinasi antar instansi, pemberkasan digital, dan kepuasan stakeholder, serta menghasilkan pergeseran budaya kerja yang lebih kolaboratif dan responsif secara kualitatif. Dengan adanya transformasi digital dan peningkatan kapasitas teknis serta administrasi melalui pelatihan dan pendampingan, proses dokumentasi dan penyelesaian konflik dapat dilakukan secara efisien dan transparan, mendukung pelaksanaan Perda secara efektif. Temuan ini menegaskan bahwa intervensi berbasis evidence dan pendekatan multi-metode memiliki potensi besar untuk dijadikan model dalam perbaikan sistem tata kelola pemerintahan daerah guna mencapai pelayanan publik yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Saran untuk penelitian lebih lanjut didasarkan pada keterbatasan dan temuan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas ruang lingkup intervensi dengan melibatkan variasi konteks geografis dan demografis yang lebih luas, sehingga model intervensi dalam optimalisasi penegakan Perda melalui peningkatan koordinasi dan pemberkasan dapat diuji secara komparatif pada instansi pemerintah daerah lain. Penelitian lanjutan perlu mengintegrasikan pendekatan mixed-method guna menggabungkan analisis kuantitatif dan

kualitatif secara lebih mendalam, terutama untuk menangkap dinamika perubahan budaya kerja dan peran teknologi informasi dalam pemberkasan yang selama ini masih terbatas pada studi awal ini. Disarankan pula untuk melakukan evaluasi jangka panjang mengenai dampak intervensi ini, dengan mengadopsi desain longitudinal yang memungkinkan pengamatan terhadap perubahan dan kesinambungan efektivitas intervensi seiring waktu. Selain itu, penelitian selanjutnya hendaknya memasukkan variabel pengukuran baru, seperti persepsi dan motivasi aparat dalam melaksanakan tugas, serta tingkat kepercayaan stakeholder yang dapat memengaruhi keberlangsungan kebijakan *evidence-based* dalam penegakan. Adapun rekomendasi lain adalah memperdalam analisis mengenai integrasi sistem informasi digital dengan sistem koordinasi internal, sehingga aspek teknis dan manajerial dapat dianalisis secara terpisah dan holistik, guna mengidentifikasi tantangan dan peluang secara lebih spesifik untuk perbaikan di masa mendatang. Saran-saran tersebut diharapkan dapat menutupi kekurangan penelitian ini serta memberikan dasar yang lebih kuat untuk inovasi kebijakan dan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan daerah dalam upaya penegakan Perda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Satpol PP Banjarmasin atas dukungan, kerja sama, dan partisipasinya yang sangat berharga dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Kontribusi nyata dari Satpol PP Banjarmasin, mulai dari penyediaan informasi, tenaga, hingga dukungan administratif, telah memfasilitasi terlaksananya program pengabdian secara optimal dan berdampak positif bagi masyarakat. Terima kasih atas komitmen dan peran aktif yang telah diberikan sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang memuaskan.

REFERENSI

- Adji, W., Saleh, M., Taryanto, A., Nunung, A., & Suharto, E. (2023). Pembinaan teknis (bintek) e-government untuk peningkatan layanan pemerintah di kecamatan rancasari kota bandung. *Padma*, 3(2), 31-41. <https://doi.org/10.56689/padma.v3i2.1067>
- Amalia, L. and Fitri, I. (2024). Kajian yuridis tanggung jawab negara dalam penerapan pasal 31 huruf d peraturan daerah no 8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kabupaten jember. *jcl*, 1(1), 15. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i1.2289>
- Anggalana, A. (2025). Fungsi satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan peraturan daerah kabupaten pesawaran nomor 9 tahun 2017 tentang ketenteraman dan ketertiban umum. *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1), 819-832. <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5295>
- Lasahido, A. (2021). Peran satuan polisi pamong praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di kota depok provinsi jawa barat. *Jurnal Renaissance*, 6(2), 829. <https://doi.org/10.53878/jr.v6i2.153>
- Mardinata, E., Cahyono, T., & Rizqi, R. (2023). Transformasi digital desa melalui sistem informasi desa (sid): meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. *Parta Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 73-81. <https://doi.org/10.38043/parta.v4i1.4402>
- Sarno, S., Hakim, R., & Solekan, M. (2024). Pemberdayaan kemitraan masyarakat kelompok wanita tani dewi sri desa karanganyar banjarnegara melalui peningkatan daya saing produk pangan lokal tiwul instan. *Jurpikat (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 5(4), 1250-1260. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v5i4.2003>
- Sudirman, R. (2024). Urgensi pembentukan tim analisis kebutuhan perda (akp) dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah. *sultan_htn*, 2(2), 42-51. https://doi.org/10.35905/sultan_htn.v2i2.7973
- Sugiarta, I. and Widiati, I. (2020). Tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis partisipasi masyarakat untuk pembangunan daerah bali. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 96-102. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1862.96-102>
- Tanjung, R. (2022). Pengembangan kompetensi pelayanan publik asn melalui jalur magang di kabupaten karawang. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 793-799. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i3.489>